

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH ¹

Yusman Syaukat

Staf Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 Tlp 0251-8626520.
E-mail: ysyaukat@yahoo.com.

ABSTRACT

Agribusiness and local economic development have a close connection. Agricultural development through agribusiness approach has proven to improve local economic development in many countries: increase added value and income of farmers, and create job opportunities for the people. Main commodities grown in Kapuas District, Province of Central Kalimantan are rice, rubber, and fish and livestock products. However, those commodities have not yet developed according to agribusiness principals, since most of them are sold as raw materials, thus the region losses its economic potential from processing those products. The objective of this paper is to explore agribusiness development strategy in Kapuas Regency to be able to contribute to local economic development. To meet this objective, agribusiness in Kapuas Regency should be based on local condition and resources, by considering local agro-ecosystem, social principal (fairness, democracy), economic principal (market oriented, competitiveness, added value, and job opportunity), and supported by sufficient local government policy through institutional, technology and capital development..

Keyword: *agribusiness, local economy development, competitiveness, added value, Kapuas regency.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian dan agribisnis merupakan dua hal berbeda. Sektor pertanian seringkali diartikan sebagai aktivitas produksi usahatani (*production operation on the farm*) semata. Agribisnis memiliki pengertian yang lebih luas dari pada sektor pertanian, karena ia tidak sekedar mencakup aktivitas produksi

usahatani, tetapi juga aspek hulu (pengadaan bahan baku) dan hilirnya (pengolahan dan pemasaran). Dengan demikian, pengembangan agribisnis memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sektor pertanian.

Hingga saat ini sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2007), pada tahun 2006, sektor pertanian menyumbang 12,90 persen dari total PDB Indonesia, yakni Rp 430,49 triliun dari total Rp 3.338,20 triliun. Persentase penduduk berumur lebih dari 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian (mencakup pertanian,

¹ Versi awal paper ini dipersiapkan dalam acara Seminar Sehari "Peringatan Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-200 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas ke-55" di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, 16 Maret 2006.

perkebunan, kehutanan, dan perikanan) mencapai 42,05 persen dari total 160,81 juta penduduk. Nilai-nilai tersebut belum termasuk nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dan tenaga kerja yang diserap oleh sektor hulu maupun hilirnya.

Fakta dari negara-negara industri dan maju di dunia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lainnya menunjukkan bahwa ketangguhan mereka tidak hanya dari sektor industri dan jasanya, tetapi juga tangguh di bidang agribisnisnya. Ketangguhan sektor agribisnis Indonesia tampak ketika terjadi krisis ekonomi 1997. Industri-industri yang kurang mengakar dan tidak didasarkan pada penggunaan sumberdaya lokal (*footloose industries*) mengalami kebangkrutan, sementara industri-industri yang mengandalkan sumberdaya lokal (*local resource base*), seperti sektor pertanian dan agribisnis, bisa bertahan bahkan sebagian bisa berkembang.

Agribisnis merupakan satu-satunya sektor yang mengalami laju pertumbuhan PDB yang positif, meskipun hanya 0,26 persen, pada tahun 1998. Pengembangan agribisnis merupakan salah satu langkah strategis yang mesti dilaksanakan Indonesia pasca-krisis, karena sektor ini berbasiskan sumberdaya lokal dan relatif tidak tergantung pada komponen impor. Disamping itu, agribisnis juga memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang tinggi, serta memiliki orientasi ekspor dalam pemasaran produknya, sehingga dapat diandalkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang pada saat ini mencapai sekitar 30,30 juta jiwa (BPS, 2007).

Sektor pertanian masih merupakan kontributor utama bagi sebagian besar kabupaten di Indonesia, baik dalam pembentukan PDRB (produk domestik

regional bruto), kesempatan kerja dan berusaha, maupun ekspor daerah. Dengan diberlakukannya program Otonomi Daerah, kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengembangkan sistem perekonomian yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Mengingat pertanian masih menjadi sektor basis di sebagian besar daerah, maka kegiatan agribisnis merupakan usaha yang paling siap dan sesuai untuk didayagunakan dalam percepatan pembangunan ekonomi saat ini. Modernisasi agribisnis di daerah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat dijadikan solusi dalam penanganan masalah ekonomi daerah.

Pertanian dan Agribisnis di Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas, merupakan salah satu dari 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk pada tanggal 22 Maret 1951. Luas Kabupaten Kapuas saat ini mencapai 14.999 km² (sekitar 15 juta hektar), atau 9.77 persen dari total luas area Provinsi Kalimantan Tengah (RPJPD, 2005). Sebagaimana kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia, perekonomian Kabupaten Kapuas masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2004, kontribusi sektor pertanian mencapai 53,14 persen, dengan pertanian tanaman pangan sebagai sub-sektor unggulannya; sementara subsektor kehutanan memiliki kontribusi yang terkecil diantara sub-sektor pertanian lainnya. Kontribusi ekonomi sektor pertanian sebenarnya masih bisa ditingkatkan, karena kontribusi tersebut hanya berasal dari aktivitas *on-farm* semata, sementara pengolahan hasil-hasil pertanian masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dari

kontribusi sektor industri yang masih relatif rendah terhadap PDRB, yakni 7,25 persen (BPS Kabupaten Kapuas, 2005).

Sektor pertanian di Kabupaten Kapuas, berdasarkan topografinya, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni kawasan potensi pengembangan tanaman pangan dan perkebunan. Kawasan pengembangan tanaman pangan umumnya terdapat di wilayah pasang surut yang berada di wilayah selatan dan terdiri atas pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah ini dipengaruhi oleh pasang surut, dan memiliki potensi banjir (pasang naik air laut) yang cukup besar. Wilayah pengembangan perkebunan berada di bagian Utara Kabupaten Kapuas. Wilayah ini merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 mdpl.

Berdasarkan kedua masalah tersebut, yakni rendahnya tingkat pengolahan hasil-hasil pertanian dan adanya spesifikasi perusahaan jenis komoditas yang diusahakan antar wilayah, maka pengembangan sektor pertanian secara terpadu (*integrated agriculture*) dalam kerangka pengembangan agribisnis di Kabupaten Kapuas harus didasarkan pada kondisi sumberdaya alam lokal (*local resources endowment*) masing-masing wilayah.

Paper ini akan membahas dua pertanyaan penelitian (*research questions*) terkait dengan masalah di atas: (1) Bagaimana strategi pengembangan Agribisnis di Kabupaten Kapuas yang sesuai dengan kondisi sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya?, dan (2) Bagaimana upaya-upaya pengembangan agribisnis tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi lokal

(*local economic development*) yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengeksplorasi strategi pengembangan agribisnis dalam rangka pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Kapuas. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, maka tujuan spesifik dari paper ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *literature review* terhadap pengertian dan cakupan pembangunan ekonomi lokal dan agribisnis, serta keterkaitan diantara keduanya
- 2) Menganalisis potensi dan kondisi ekonomi Kabupaten Kapuas, khususnya yang terkait dengan sektor pertanian
- 3) Menentukan strategi pengembangan agribisnis berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Kapuas.

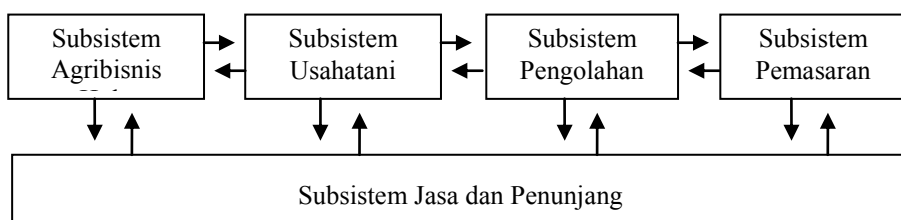
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DAN EKONOMI LOKAL

Pembangunan Agribisnis

Agribisnis merupakan paradigma baru yang telah digunakan dalam upaya-upaya pembangunan pertanian di Indonesia. Agribisnis diartikan lebih luas daripada bisnis yang dilaksanakan dalam lingkup *on farm*, menghasilkan produk pertanian semata. Agribisnis mencakup pula bisnis di sektor hulu (penyediaan bahan baku dan barang modal untuk menunjang aktivitas pertanian), bisnis di sektor hilir (pengolahan produk-produk pertanian menjadi barang jadi dan setengah jadi), pemasaran input, output dan hasil olahan pertanian, serta bisnis jasa dan penunjang (seperti perkreditan, penelitian, penyuluhan, transportasi, dan lainnya). Dengan

demikian, agribisnis merubah dari pendekatan sektoral menjadi intersektoral, dan dari produksi ke bisnis. Departemen Pertanian (2001) menggambarkan *intersectoral linkages* dalam sistem agribisnis sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Dari Gambar 1 tampak bahwa agribisnis mengaitkan subsistem-subsistem agribisnis hulu, usahatani, pengolahan, pemasaran serta jasa dan penunjang menjadi suatu sistem yang saling terintegrasi (*an integrated system*).

(*final products*). Subsistem pemasaran merupakan aktivitas pemasaran, untuk komoditas pertanian primer maupun produk hasil olahan, baik untuk tujuan pasar domestik maupun internasional. Sementara subsistem terakhir, subsistem jasa dan penunjang, merupakan kegiatan yang menyediakan jasa bagi sistem agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan pertanian, serta transportasi dan pergudangan.



Gambar 1. Lingkup Pembangunan Sistem Agribisnis

Sumber: Departemen Pertanian (2001)

Subsistem agribisnis hulu merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi pertanian, seperti industri agro-kimia (industri pupuk dan pestisida), industri benih dan bibit komoditas pertanian, serta industri agro-otomotif (industri alat mesin pertanian serta peralatan pengolahan hasil pertanian). Subsistem usahatani (*on-farm*) merupakan kegiatan pemanfaatan sarana produksi yang dihasilkan dari sistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk-produk pertanian primer, baik di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, maupun kehutanan.

Subsistem agribisnis hilir merupakan kegiatan industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk-produk olahan, baik berupa barang setengah jadi (*intermediate products*) maupun barang jadi

Departemen Pertanian, pada tahun 2000, telah menetapkan bahwa strategi dasar pembangunan pertanian adalah membangun usaha dan sistem agribisnis yang tangguh. Sistem tersebut paling tidak memiliki empat karakteristik, yaitu: (1) berdayasaing, (2) berkerakyatan, (3) berkelanjutan, dan (4) terdesentralisasi.

1) Sistem agribisnis yang **berdayasaing** dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi, serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar, serta memberikan pelayanan yang profesional. Pengembangan sistem agribisnis yang berdayasaing harus memperhatikan aspek permintaan maupun penawaran. Dalam hal ini, produk yang dikembangkan harus yang benar-benar berdayasaing dan

dikehendaki pasar (*market driven*). Dengan demikian, pendekatan lama yang berorientasi pada *supply driven* - apa yang dapat diproduksi - perlu dibenahi.

- 2) Sistem agribisnis **berkerakyatan** dicirikan oleh berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas, baik dalam peluang berusaha, kesempatan kerja, maupun dalam menikmati nilai tambah (pendapatan). Pengembangan sistem ini tidaklah berarti hanya pengembangan usaha kecil dan menengah saja, tetapi juga dapat melibatkan usaha skala besar dalam konsep kemitraan.
- 3) Pengembangan sistem agribisnis yang **berkelanjutan** merupakan usaha pengembangan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya agribisnis yang semakin besar dan mantap dari waktu ke waktu, dan semakin mensejahterakan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pelaku agribisnis tidak hanya melihat jangka pendek (*myopic*) saja, tetapi juga kepentingan jangka panjang yang mengakomodasikan pelestarian lingkungan hidup dan plasma nutfah (*biodiversity*).
- 4) Pengembangan agribisnis yang **terdesentralisasi** merupakan upaya-upaya pengembangan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan wilayah setempat, serta memiliki keunggulan kompetitif. Dengan demikian, pengembangan agribisnis pada dasarnya merupakan aktivitas pembangunan ekonomi lokal. Hal ini sesuai dengan esensi otonomi daerah, yakni melakukan desentralisasi

dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi pembangunan tersebut diwujudkan melalui dua pendekatan, yakni makro dan mikro. Pendekatan makro merupakan pendekatan sistem agribisnis, sementara pendekatan mikro merupakan pendekatan usaha-usaha agribisnis (*firms*). Dengan pendekatan sistem agribisnis tersebut, maka pertanian tidak lagi dilihat hanya pertanian primer (*on farm*) saja, tetapi juga mencakup seluruh sub-sistem sebagaimana dikemukakan pada Gambar 1. Dengan demikian, keberhasilan *on farm* juga dipengaruhi oleh subsistem lainnya, yang bisa jadi di luar mandat Departemen Pertanian itu sendiri.

Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi lokal (*local economic development*) telah menjadi tumpuan bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis. Teori pembangunan ekonomi lokal (PEL) itu sendiri memiliki beragam pengertian dan definisi. Menurut World Bank (2002) dalam Blakely (2002), PEL merupakan kerjasama seluruh komponen masyarakat di suatu daerah (lokal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic growth*) yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) dan kualitas hidup (*quality of life*) seluruh masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Lokal dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan dan pemanfaatan unsur-unsur “endogenous” (unsur-unsur lokal – yang mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi) guna menciptakan kesempatan kerja dan bisnis baru di daerah,

namun tetap dalam koridor pembangunan tingkat provinsi dan nasional (Syaukat, 2005). PEL perlu dikaitkan dan didasarkan pada kondisi-kondisi tersebut agar terjadi sinergisme antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan secara bersama-sama memperkuat kondisi ekonomi wilayah secara keseluruhan.

PEL memberi kesempatan kepada pemerintah lokal (kabupaten/kota), swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal untuk secara bersama-sama pro-aktif berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan bisnisnya sehingga mereka mampu berkompetisi dengan daerah lainnya, bahkan internasional. Untuk mencapai hal tersebut, PEL difokuskan pada upaya peningkatan daya saing (*competitiveness*), peningkatan pertumbuhan, dan redistribusi pertumbuhan tersebut melalui pembentukan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises* atau SME), dan penciptaan lapangan kerja (*job creation*). Namun demikian, kunci utama PEL adalah tetap pada pengembangan daya saing wilayah dalam menghasilkan suatu produk/jasa tertentu. GTZ (2003) mengungkapkan bahwa "*LED is all about competitive advantage*" – pengembangan daya saing perusahaan lokal dan daerah (lokalitas).

Pembangunan Ekonomi Lokal di Indonesia mendapatkan momentum yang tepat untuk dikembangkan karena dua faktor. Faktor pertama, karena adanya kekeliruan pendekatan pembangunan selama periode sebelumnya yang bersifat sentralistik, tidak didasarkan atas penggunaan sumberdaya lokal namun lebih bersifat *footloose industries*. Disamping itu, *trickle down effect* (efek tetesan ke bawah) yang diharapkan pemerintah dalam pengembangan ekonomi nasional yang bersifat kapitalistik ternyata mengalami

kegagalan. Kedua, dengan diaplikasikannya program otonomi daerah, konsep PEL menjadi penting, karena sistem sentralistik kurang memberikan pembelajaran kepada daerah dalam pengembangan ekonomi daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, PEL merupakan suatu keniscayaan karena sukar sekali diharapkan suatu pembangunan ekonomi nasional yang bersifat sentralistik dapat kompatibel dengan kebutuhan dan potensi daerah. Arifin (2003) mengungkapkan bahwa konsep desentralisasi ekonomi tidak lain merupakan tuntutan efisiensi dan skala ekonomi yang lebih adil antara pusat dan daerah.

Pemilihan dan aplikasi suatu strategi PEL menjadi sangat penting dalam konteks otonomi daerah. Langkah awal ini seharusnya merupakan suatu prasyarat bagi setiap daerah untuk mengetahui secara persis posisi dan berkah sumberdayanya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap posisi dan potensi sumberdaya tersebut mutlak diperlukan, sebelum menentukan strategi dan jenis komoditas apa yang akan dikembangkan.

Pemilihan kegiatan PEL harus didasarkan atas hasil analisis basis sosio-ekonomi dan kapasitas pembangunan dari masyarakatnya. Secara umum, kegiatan PEL dapat dibedakan menjadi dua: kegiatan basis dan non-basis. Kegiatan Basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya, baik berupa barang atau jasa, dialokasikan untuk tujuan "ekspor" ke luar lingkungan masyarakat tersebut. Dengan demikian, kegiatan ini dapat digolongkan ke dalam kegiatan masyarakat yang berorientasi ke luar, baik di tingkat regional, nasional atau internasional. Untuk mencapai hal ini, maka penciptaan *competitive advantage* bagi produk yang dihasilkan di daerah tersebut menjadi sangat penting. Kegiatan non-basis merupakan

kegiatan masyarakat yang hasilnya diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dan dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Barang-barang jadi dan pelayanan yang dihasilkan diperuntukkan bagi ruang lingkup pasar dan kesejahteraan mereka sendiri -- untuk tujuan *self sufficiency*.

Setiap daerah seyogyanya, berdasarkan deliniasi daerah-daerah pembangunan, dapat dengan tepat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan strategis yang sesuai bagi pembangunan daerahnya. Apabila setiap daerah mampu mengembangkan basis ekonominya, maka akan dihasilkan surplus produksi yang dapat dipasarkan ke luar daerah (*marketable surplus*). Penghasilan tersebut, dapat diinvestasikan kembali untuk memperkuat atau untuk mengembangkan kegiatan lainnya sehingga akan menciptakan *multiplier effect* (dampak berganda) bagi pembangunan selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi lainnya.

Agribisnis, Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Lokal

Otonomi daerah telah mengantarkan adanya transformasi peran, dari pemerintah ke masyarakat dan dari pusat ke daerah. Hal ini merupakan bagian dari proses yang lebih besar lagi, yaitu menuju ke demokratisasi dalam semangat kedaulatan rakyat yang sebenarnya, sehingga diharapkan akan membentuk masyarakat yang lebih berdaulat, demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif. Dengan desentralisasi setiap daerah dapat menetapkan strategi pengembangan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi dan kepentingan mereka. Diantara kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat lebih

berkembang dengan adanya program otonomi daerah adalah pembangunan pertanian (dalam arti luas). Krisnamurthi² mengungkapkan adanya empat alasan bahwa pembangunan pertanian dan otonomi daerah saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.

Pertama, pembangunan pertanian membutuhkan apresiasi yang tinggi terhadap faktor keanekaragaman, yang merupakan pilar keunggulan pertanian. Keanekaragaman tersebut ditunjukkan oleh jenis produk yang bersifat *local-specific*, kondisi sosial budaya, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda antar wilayah. Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk untuk mewujudkan semua hal tersebut. Masing-masing daerah dapat menentukan jenis agribisnis yang akan dikembangkan dan bagaimana cara pengembangannya.

Kedua, pembangunan pertanian membutuhkan keluwesan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangannya, sesuai dengan keanekaragaman jenis produk, lokasi, dan kondisi pelaku usahanya. Dilain pihak, otonomi daerah juga membutuhkan redefinisi dan reposisi peran pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses reposisi tersebut justru menjadi semakin jelas dengan adanya otonomi daerah. Paling tidak peran pemerintah (pusat) yang sentralistik semakin berkurang dalam mengimplementasikan kegiatan pengembangan secara langsung. Peran tersebut akan berubah menjadi peran

² "Peran Pembangunan Pertanian dalam Pembangunan Industri dan Daerah: Pelajaran dari Kasus Cianjur dan Subang".
<http://www.jajaki.or.id/data/publications/Bayu%20K.pdf>

dukungan, fasilitasi, dan regulasi, serta peran untuk mendorong terwujudnya lingkungan strategis yang kondusif bagi perkembangan agribisnis dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Sementara peran perencanaan akan lebih banyak dikembangkan pemerintah daerah yang memang lebih memahami fokus kegiatan yang harus dikembangkan.

Ketiga, pembangunan pertanian akan lebih banyak bertumpu pada peran dan partisipasi perorangan atau kelompok masyarakat. Kebutuhan dukungan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan pertanian di masing-masing daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Pelajaran selama ini menunjukkan bahwa apa yang diprioritaskan oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat tidak jarang berbeda dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelaku usaha di daerah. Melalui otonomi daerah dukungan tersebut dapat lebih terfokus. Disamping itu, dengan otonomi tingkat persaingan yang dihadapi pengusaha daerah juga akan menjadi lebih realistis: pengusaha daerah akan memiliki ajang persaingan yang lebih *fair* karena terdapat harapan bagi berkurangnya campur tangan supra-struktur yang selama ini justru menjadi salah satu penghambat utama dalam perkembangan kegiatan bisnis lokal.

Keempat, pembangunan pertanian sebagai sistem agribisnis membutuhkan pemahaman dan operasionalisasi kerja jaringan usaha antar pelaku dan antar wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri. Jaringan kerja (*network*) tersebut sangat diperlukan bukan hanya dalam satu sistem agribisnis, tetapi juga antar sistem, antara pelaku usaha sejenis atau yang memiliki keterkaitan erat dan langsung, maupun antara berbagai insitusi yang terkait dengan agribisnis. Otonomi daerah diharapkan tidak justru menjadi penghambat

adanya kerjasama antar daerah. Pemahaman yang kuat atas pendekatan integratif dalam sistem menjadi syarat mutlak untuk mencegah agar otonomi tidak justru menjadi penghambat pengembangan sistem agribisnis.

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah, seyogyanya pembangunan pertanian dapat lebih berkembang. Pada gilirannya hal ini akan juga mendorong perkembangan daerah secara keseluruhan. Data dari 328 kabupaten (dari 400 lebih kabupaten yang ada pada saat ini) menunjukkan bahwa 92 persen diantaranya memiliki ekonomi yang berbasis pertanian (dalam arti luas). Dengan demikian, pembangunan pertanian juga berarti pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Dari pemikiran ekonomi pembangunan konvensional, perkembangan pertanian akan berdampak positif bagi industri, dan akhirnya bagi perekonomian secara keseluruhan. Pemikiran-pemikiran pembangunan modern telah menunjukkan bahwa pertanian penting dan akan tetap penting karena: mampu menciptakan permintaan terhadap barang-barang hasil industri; memasok bahan baku bagi perkembangan industri; memasok bahan pangan; menghasilkan surplus tenaga kerja dan surplus pembiayaan bagi pengembangan industri; menciptakan ketahanan pangan; pengurangan kemiskinan; kelestarian lingkungan; keberlanjutan nilai-nilai sosial budaya; penyangga saat terjadi goncangan ekonomi eksternal, dan berbagai aspek non-transaksional lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan negara-negara industri tetap mempertahankan pertaniannya.

Disamping faktor keterkaitan di atas, sumberdaya agribisnis juga merupakan sumberdaya ekonomi yang paling dikuasai

oleh masyarakat di setiap daerah. Sumberdaya tersebut dapat berbasiskan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan agribisnis secara terintegrasi. Pengembangan agribisnis tersebut harus disertai upaya-upaya transformasi dari *factor (supply) driven* menjadi *demand (market) driven*, dari keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keuntungan kompetitif (*competitive advantage*), dan disertai dengan upaya-upaya penguatan kapital, pemanfaatan teknologi unggul dan tepat guna, pengembangan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan organisasi ekonomi lokal yang telah ada di masyarakat. Dengan transformasi tersebut, kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produk-produk agribisnis, yang saat ini masih didominasi oleh produk-produk yang bersifat *less capital, less knowledge*, dan *unskill labor based*, secara bertahap beralih kepada produk-produk yang lebih bersifat *capital, knowledge*, dan *skill labor based*. Dengan demikian, produk-produk yang dihasilkan akan mampu bersaing dan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik di level wilayah, nasional, maupun internasional.

Pengembangan agribisnis di setiap daerah harus juga disertai dengan pengembangan organisasi ekonomi, khususnya petani, agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat dan daerah. Di masa lalu, petani hanya menikmati nilai tambah dari subsistem agribisnis *on farm* yang umumnya relatif kecil. Nilai tambah yang paling besar, yakni pada subsistem agribisnis hulu dan hilir, justru dinikmati

oleh para pedagang atau pengusaha yang berada di luar sistem mereka atau di luar daerah. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pendapatan petani tetap rendah dan ekonomi daerah di sentra-sentra agribisnis juga kurang berkembang.

KONDISI DAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN KAPUAS

Kondisi Sumberdaya Alam

Padi merupakan komoditas utama dari subsektor tanaman pangan Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2004, Kabupaten Kapuas menghasilkan sekitar 288 ribu ton padi, yang terdiri atas 249 ribu ton padi sawah dengan produktivitas rata-rata 3.20 ton/ha, dan 39 ribu ton padi ladang dengan produktivitas rata-rata 2.53 ton/ha (BPS Kabupaten Kapuas, 2005). Komoditas tersebut dihasilkan dari sekitar 120 ribu hektar lahan pertanian yang diusahakan, yang terdiri dari beberapa jenis lahan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 tampak bahwa lahan beririgasi teknis dan setengah teknis masih belum tersedia di Kabupaten Kapuas. Lahan-lahan pertanian yang tersedia antara lain lahan pasang surut, tadah hujan, irigasi sederhana, dan irigasi desa. Dilihat dari penggunaannya, lahan pasang surut memiliki luas penggunaan yang terbesar, diikuti oleh lahan tadah hujan, dan lahan irigasi sederhana. Berdasarkan intensitas tanamnya, sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Kapuas hanya bisa ditanami padi satu kali dalam setahun (mencakup 65 persen luas lahan), sedangkan lahan yang bisa ditanami padi hingga dua kali (atau lebih) per tahun hanya 17.2 persen. Lahan



Tabel 1. Penggunaan Lahan untuk Penanaman Padi Di Kab. Kapuas, 2004

| No | Jenis Lahan | Intensitas Penanaman Padi (Ha) | | Sementara tidak Diusahakan | Jumlah |
|------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| | | Satu kali | Dua kali atau lebih | | |
| 1 | Irigasi teknis | - | - | - | - |
| 2 | Irigasi setengah teknis | - | - | - | - |
| 3 | Irigasi sederhana | 13,518 | 4,204 | 4,906 | 22,628 |
| 4 | Irigasi desa (Non-PU) | 6,099 | 3,546 | - | 9,645 |
| 5 | Tadah hujan | 26,102 | - | 6,652 | 32,754 |
| 6 | Pasang surut | 34,066 | 13,251 | 9,464 | 56,781 |
| 7 | Lebak | - | - | - | - |
| T o t a l | | 79,785 | 21,001 | 21,022 | 121,808 |
| Persentase | | 65,5% | 17,2% | 17,3% | 100,0% |

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas (2005) (diolah).

yang sementara tidak dimanfaatkan cukup besar, sekitar 17,3 persen.

Disamping padi, Kabupaten Kapuas juga menghasilkan beberapa komoditas unggulan lainnya, khususnya karet (dari subsektor perkebunan), dan beberapa jenis komoditas peternakan dan perikanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Komoditas “unggulan” dalam hal ini diartikan sebagai kontribusi Kabupaten Kapuas dalam menghasilkan suatu komoditas lebih besar dari 10 persen³ dari total produksi komoditas tersebut di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari Tabel 2 tampak bahwa padi, khususnya padi sawah, merupakan komoditas unggulan terpenting Kabupaten Kapuas, dimana kontribusinya mencapai 66,5 persen dari total produksi padi sawah Provinsi Kalimantan Tengah. Total produksi padi sawah Kabupaten Kapuas mencapai 250 ribu ton, sedangkan Provinsi

Kalimantan Tengah mencapai 375 ribu ton pada tahun 2004. Produksi padi ladang Kabupaten Kapuas juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total produksi padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat produksi padi ladang mencapai 39 ribu ton, dengan kontribusi mencapai 18,2 persen dari total 215 ribu ton produksi padi ladang Provinsi Kalimantan Tengah.

Kapuas menghasilkan 19,98 ribu ton karet. Produksi karet Kabupaten Kapuas menempati peringkat ke-tujuh di tingkat Provinsi, dengan kontribusi 13,7 persen. Walaupun menjadi produk unggulan, produktivitas karet rakyat ini masih relatif rendah, sekitar 802 kg/ha/tahun. Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan ini tidak hanya untuk tanaman karet, tetapi juga tanaman kelapa dan kopi.

Beberapa komoditas peternakan Kabupaten Kapuas memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap total produksi peternakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kontributor terbesar adalah ayam petelur (51 persen), dan diikuti oleh itik (14,4 persen), kambing (13,7 persen), dan ayam buras (12,7 persen).

³ Mengingat Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 14 kabupaten dan kota, maka *benchmark* kontribusi “rata-rata” suatu komoditas adalah 7 persen. Apabila kontribusi suatu komoditas lebih dari 10 persen, dapat dikatakan bahwa komoditas tersebut “unggul” di tingkat provinsi.

Tabel 2. Kontribusi Komoditas Unggulan Kab Kapuas relatif terhadap Total Produksi Komoditas di Provinsi Kalimantan Tengah, 2004

| Subsektor & Komoditas | Persen |
|-----------------------|--------|
| Tanaman Pangan: | |
| Padi sawah | 66,52 |
| Padi lading | 18,19 |
| Perkebunan: | |
| Karet | 13,69 |
| Peternakan: | |
| Kambing | 13,68 |
| Ayam buras | 12,88 |
| Ayam petelur | 51,25 |
| Itik | 14,42 |
| Perikanan: | |
| Perikanan Laut | 11,10 |

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas (2005) dan BPS Provinsi Kalimantan Tengah (2005) (diolah).

Kecamatan Kapuas Kuala merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan laut, yakni Laut Jawa di bagian selatan. Total produksi perikanan laut Kabupaten Kapuas mencapai 5.130 ton pada tahun 2004. Total produksi tersebut memberikan kontribusi sebesar 11,1 persen terhadap total produksi perikanan laut Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi Ekonomi

Kontribusi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 dan 2004 disajikan pada Tabel 3. Dari data tersebut tampak bahwa sektor pertanian merupakan kontributor utama PDRB, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Secara umum tidak terdapat perbedaan struktur ekonomi secara signifikan diantara Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontributor utama PDRB di Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase keduanya pun tidak terlalu berbeda. Hanya saja, sektor jasa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sudah

lebih maju dibandingkan dengan di Kabupaten Kapuas (11,4 persen dibandingkan dengan 6,2 persen).

Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Kapuas mencapai 53,1 persen (Rp 843,03 milyar) pada tahun 2004, sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 45,9 persen (Rp 8.322,37 milyar). Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi perekonomian di kedua wilayah tersebut; sehingga pengembangan agribisnis sangat sesuai dilaksanakan di kedua wilayah ini. Sektor lain yang memiliki kontribusi lebih besar dari 10 persen terhadap PDRB di Kabupaten Kapuas adalah sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,3 persen). Sektor-sektor lainnya yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cukup besar, namun kurang dari 10 persen, adalah sebagai berikut: bangunan/konstruksi (8,5 persen), industri pengolahan (7,3 persen), dan jasa (6,1 persen). Adapun sektor yang memiliki kontribusi terendah adalah pertambangan, serta listrik dan air bersih.

Berdasarkan indikator nilai *Location Quotient* (LQ), Kabupaten Kapuas memiliki empat sektor basis, yakni: sektor

pertanian, industri pengolahan, bangunan / konstruksi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Nilai LQ merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (atau tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat Kabupaten (Kapuas) terhadap tingkat pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* tersebut pada tingkat Provinsi (Kalimantan Tengah). Nilai LQ ini dapat membedakan suatu sektor menjadi sektor basis atau non-basis. Suatu sektor dikatakan sebagai sektor basis jika nilai $LQ \geq 1$, dan non-basis jika nilai $LQ < 1$. Suatu sektor dikatakan sektor basis apabila sektor tersebut menghasilkan barang dan jasa yang selain mampu

pengolahan, bangunan/konstruksi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Apabila dibandingkan dengan Tabel 3, tampak bahwa sektor-sektor basis ini memiliki nilai kontribusi terhadap PDRB yang besar pula. Akan tetapi, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki kontribusi cukup besar di Kabupaten Kapuas (15,25 persen) ternyata tidak menjadi sektor basis, karena kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah lebih besar (20,56 persen). Dengan demikian, walaupun kontribusinya besar, namun baru bisa "memenuhi kebutuhan sendiri".

Tabel 3. Perbandingan Persentase Produk Domestik Regional Bruto* Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2003-2004

| No. | Sektor | Kab. Kapuas | | Prov. Kalteng | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| 1 | Pertanian | 53,72 | 53,14 | 48,64 | 45,86 |
| 2 | Pertambangan | 0,36 | 0,35 | 0,80 | 0,82 |
| 3 | Industri Pengolahan | 7,75 | 7,25 | 6,45 | 6,64 |
| 4 | Listrik & Air Bersih | 0,28 | 0,29 | 0,44 | 0,43 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 8,25 | 8,52 | 4,33 | 4,34 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 15,13 | 15,25 | 17,87 | 20,56 |
| 7 | Pengangkutan & Telekomunikasi | 4,25 | 4,35 | 7,95 | 7,67 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 3,88 | 4,71 | 2,19 | 2,27 |
| 9 | Jasa | 6,38 | 6,15 | 11,33 | 11,41 |
| Total | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS Kab. Kapuas (2005), BPS Prov. Kalimantan Tengah (2005) (diolah)

Ket: * Atas dasar Harga Berlaku

memenuhi kebutuhan permintaan pasar di wilayah tersebut, juga dapat diekspor ke luar wilayah. Pertanian, misalnya, memiliki nilai LQ sebesar 1,1586 pada tahun 2004 (Tabel 4), artinya sektor pertanian di Kabupaten Kapuas menghasilkan produk-produk yang tidak saja dapat memenuhi kebutuhan/permintaan di daerah, juga bisa diekspor ke luar Kabupaten Kapuas.

Disamping sektor pertanian, Kabupaten Kapuas memiliki tiga sektor basis lainnya, yakni: sektor industri

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai LQ semakin menguat dari tahun 2003 ke 2004, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penguatan sektor basis di Kabupaten Kapuas, khususnya pada sektor pertanian, bangunan/konstruksi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi masing-masing subsektor di dalam sektor pertanian di Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perbedaan pola. Di Kabupaten Kapuas, subsektor tanaman bahan makanan memiliki

Tabel 4. Nilai *Location Quotient* Menurut Sektor di Kabupaten Kapuas, 2003-2004

| No. | Sektor | Kabupaten Kapuas | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| | | 2003 | 2004 |
| 1 | Pertanian | 1,1046 | 1,1586 |
| 2 | Pertambangan | 0,4447 | 0,4279 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,2008 | 1,0910 |
| 4 | Listrik & Air Bersih | 0,6352 | 0,6662 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi | 1,9066 | 1,9637 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 0,8467 | 0,7415 |
| 7 | Pengangkutan & Telekomunikasi | 0,5344 | 0,5668 |
| 8 | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 1,7745 | 2,0768 |
| 9 | Jasa | 0,5630 | 0,5394 |
| Total | | 1,0000 | 1,0000 |

Sumber: BPS Kab. Kapuas (2005), BPS Prov. Kalimantan Tengah (2005) (diolah)

kontribusi yang tertinggi, sementara di Provinsi Kalimantan Tengah subsektor tanaman perkebunan (Tabel 5). Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan struktur aktivitas ekonomi diantara kedua wilayah, di Kabupaten Kapuas berbasis tanaman pangan, sementara di Provinsi Kalimantan Tengah berbasis perkebunan.

Perbedaan struktur ekonomi tersebut memiliki implikasi terhadap sub-sektor basis di Kabupaten Kapuas. Tabel 6 menunjukkan bahwa subsektor tanaman bahan makanan memiliki nilai LQ yang tertinggi, mengindikasikan bahwa subsektor tersebut merupakan subsektor basis di Kabupaten Kapuas. Tingginya nilai LQ tersebut (3,06 pada tahun 2004) menunjukkan "kekuatan" Kabupaten Kapuas dalam menghasilkan komoditas bahan makanan di Kalimantan Tengah. Walaupun komoditas unggulan, subsektor bahan makanan – khususnya padi – di Kabupaten Kapuas sebagian besar masih diusahakan untuk kebutuhan subsistensi dan belum bersifat komersial (RPJPD 2005-2025). Disamping subsektor tanaman bahan makanan, sub-sektor perikanan ternyata juga merupakan sub-sektor basis di Kabupaten Kapuas.

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI KABUPATEN KAPUAS

Permasalahan dalam Pengembangan Agribisnis

Pembangunan agribisnis di Kabupaten Kapuas dihadapkan kepada berbagai tantangan yang sifatnya dinamis:

- 1) Produktivitas dan efisiensi usahatani yang rendah. Secara umum tingkat produktivitas dan efisiensi usahatani masih sangat rendah. Masalah ini terkait dengan kondisi sumberdaya alam di Kabupaten Kapuas yang sebagian besar berupa lahan pasang surut dan tadah hujan. Masalah ini dapat diatasi dengan pendekatan: (a) penerapan teknologi dan bioteknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah, dan (b) pendekatan agribisnis yang mampu menciptakan nilai tambah.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kata kunci dalam mencapai stabilitas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ketersediaan pangan ini sangat rentan terhadap perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, dan

Tabel 5. Perbandingan Kontribusi Subsektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2003-2004

| No. | Sub Sektor | Kab. Kapuas | | Prov. Kalteng | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| 1 | Tanaman Bahan Makanan | 28,14 | 27,41 | 8,02 | 7,72 |
| 2 | Tanaman Perkebunan | 10,01 | 10,27 | 20,97 | 20,89 |
| 3 | Peternakan & Hasilnya | 4,16 | 4,30 | 4,23 | 4,06 |
| 4 | Kehutanan | 4,30 | 4,04 | 9,23 | 7,20 |
| 5 | Perikanan | 7,12 | 7,13 | 6,18 | 5,98 |
| Sektor Pertanian | | 53,72 | 53,14 | 48,64 | 45,86 |

Sumber: BPS Kab. Kapuas (2005), BPS Prov. Kalimantan Tengah (2005) (diolah)

- gejolak pasar. Ditambah lagi dengan kurang berperannya lembaga Bulog/Dolog dalam pengadaan stok bahan pangan, khususnya beras, di daerah.
- 3) Rendahnya tingkat pengolahan komoditas yang dihasilkan. Hasil-hasil pertanian primer umumnya langsung dijual tanpa mengalami proses pengolahan lanjutan, sehingga potensi nilai tambah tidak dapat terealisasi.
 - 4) Kondisi sumberdaya lahan relatif kurang subur. Sebagian besar lahan yang terdapat di Kabupaten Kapuas terdiri atas lahan pasang surut dan lahan tadah hujan. Dalam hal produktivitas, kedua lahan tersebut kurang memberikan hasil yang tinggi. Pengembangan komoditas dengan teknologi sesuai kondisi lingkungan perlu dikembangkan dalam mengatasi hal ini.
 - 5) Rendahnya pemeliharaan tanaman di bidang perkebunan. Kebun-kebun (karet) umumnya menggunakan bibit lokal dan kurang perawatan, sehingga memiliki produktivitas rendah.
 - 6) Rendahnya akses pasar dan infrastruktur ekonomi. Rendahnya aksesibilitas lokasi pengembangan pertanian terhadap fasilitas pasar, perbankan, transportasi, serta pelayanan umum (penyuluhan dan

- lainnya) menyebabkan kurang berkembangnya hasil-hasil pertanian.
- 7) Kurangnya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan pertanian, misalnya dalam upaya mendorong investasi swasta, akses terhadap sumberdaya pertanian.

Strategi Pembangunan Agribisnis

Keberhasilan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di suatu daerah sangatlah kompleks, karena sistem pertanian merupakan suatu sistem yang terbuka, sangat dipengaruhi oleh iklim, lahan dan air, biota, teknologi, pelaku pasar, dan kebijakan pemerintah. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, beberapa prinsip perlu diperhatikan:

- 1) Pengembangan kegiatan yang sesuai lokasi (*specific location*). Pembangunan pertanian harus bersifat *specific location*. Dalam hal ini sumberdaya tanah yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya. Dengan demikian, pemilihan komoditas yang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah, khususnya pada wilayah pasang surut dan tadah hujan, perlu dilaksanakan.

Tabel 6. Nilai *Location Quotient* Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kapuas, 2003-2004

| No. | Subsektor | 2003 | 2004 |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1 | Tanaman Bahan Makanan | 3,177 | 3,063 |
| 2 | Tanaman Perkebunan | 0,432 | 0,424 |
| 3 | Peternakan & Hasilnya | 0,889 | 0,913 |
| 4 | Kehutanan | 0,421 | 0,484 |
| 5 | Perikanan | 1,043 | 1,029 |

Sumber: BPS Kab. Kapuas (2005), BPS Prov. Kalimantan Tengah (2005) (diolah)

- 2) Pemberdayaan petani. Upaya-upaya pemberdayaan petani perlu terus dilakukan, misalnya dengan meningkatkan kembali program bimbingan dan penyuluhan dari petugas pertanian, serta memberikan kejelasan hak-hak atas sumberdaya alam, khususnya tanah, yang dimiliki/diusahakannya.
- 3) Pengembangan agroteknologi. Jenis teknologi apa yang akan dikembangkan di suatu daerah haruslah adaptif dengan kondisi lingkungan setempat. Dalam hal ini, pengembangan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan haruslah disesuaikan dengan kondisi lingkungan Kabupaten Kapuas yang sebagian besar terdiri atas lahan pasang surut dan lahan tadah hujan. Mengingat kondisi tersebut, mungkin masyarakat setempat telah mengembangkan teknologi yang sudah terbukti sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Jika demikian, maka *indigenous technology* yang ada (teknologi yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat) perlu dikembangkan lebih lanjut.
- 4) Pengembangan sistem kemitraan. Mengingat sebagian besar masyarakat petani masih terkendala dengan keterbatasan modal, pengetahuan, dan kemampuan manajerial, maka pengembangan program kemitraan yang sinergis (saling menguatkan dan menguntungkan), baik dengan pemerintah, swasta, maupun dengan sesama anggota masyarakat perlu dikembangkan. Program kemitraan ini dapat dilaksanakan baik di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan.
- 5) Pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur pertanian dan non-pertanian di daerah perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengembangan agribisnis. Infrastruktur pertanian perlu disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung lingkungan setempat, misalnya dalam hal pengembangan sistem drainase. Pengembangan infrastruktur non-pertanian harus pula dikaitkan dengan upaya pengembangan agribisnis setempat. Misalnya pengembangan infrastruktur perdagangan dan industri harus mendukung pengembangan pertanian yang dilaksanakan di daerah tersebut.
- 6) Pengembangan program yang bersifat holistik (integral). Dalam hal ini program-program pengembangan pertanian harus menggunakan pendekatan agribisnis secara integral: antar sektor dan hulu-hilir.
- 7) Pengembangan program pembangunan agribisnis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin (*pro poor development*). Tanpa adanya pemihakan yang kuat dalam program

pembangunan, masyarakat miskin akan sulit dientaskan, dan akan menimbulkan kesenjangan yang semakin besar diantara kelompok masyarakat.

Pendekatan agribisnis tidak akan memperoleh hasil yang maksimal tanpa memperhatikan aspek lingkungan dari daerah yang akan dikembangkan. Hal ini mengindikasikan perlunya keterpaduan antara pembangunan pertanian (dengan pendekatan agribisnis) dan pembangunan perdesaan dan daerah secara umum. Sinergi yang kuat antara kedua hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Winoto (1997) mengungkapkan adanya tiga pilar utama dalam pembangunan daerah melalui pendekatan agribisnis yang dapat menghasilkan komoditas unggulan, yakni:

- 1) Adanya immobilitas spasial. Faktor produksi pertanian umumnya bersifat immobil, seperti sumberdaya lahan. Dengan demikian, suatu daerah dapat memiliki keunggulan yang khas dalam menghasilkan suatu produk atau komoditas tertentu yang tidak mungkin dihasilkan oleh wilayah lainnya. Sifat *local specific* ini akan menyebabkan timbulnya variabilitas produk pertanian antar wilayah.
- 2) Adanya keuntungan untuk melakukan usaha pertanian secara terkonsentrasi. Kegiatan pembangunan pertanian yang terkonsentrasi ini pada dasarnya dilakukan untuk dapat memanfaatkan *economics of scale* dalam berproduksi, sehingga dapat menghasilkan berbagai keuntungan. Salah satu bentuk keuntungan adalah dalam hal penyediaan sarana produksi dan pemasaran yang terintegrasi.
- 3) Adanya biaya angkut dan biaya transportasi. Kegiatan pembangunan

pertanian yang dilaksanakan di lokasi yang relatif terisolasi akan mempengaruhi biaya produksi, khususnya biaya transportasi dan komunikasi. Oleh karena itu, faktor jarak menjadi determinan penting dalam pembangunan pertanian.

Berdasarkan permasalahan dan prinsip di atas, maka strategi pengembangan agribisnis di Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi yang berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja di bidang agribisnis, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta efisiensi usaha. Pengembangan strategi ini bertujuan untuk menciptakan daya saing dan nilai tambah (*added value*) dari produk-produk yang dihasilkan daerah.
- 2) Peningkatan kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan diantara pelaku-pelaku usaha di dalam subsistem penyedia bahan baku, usahatani, pengolahan, pemasaran, serta fasilitas dan jasa penunjang. Dengan pengembangan strategi ini, maka pengembangan sistem agribisnis yang lengkap (terintegrasi) dapat diwujudkan, serta akan menciptakan kluster industri (*industry cluster*) yang kuat. Kerjasama ini juga diarahkan dalam rangka memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang ada di daerah.
- 3) Pemberdayaan (*empowerment*) para petani dalam kelompok-kelompok tani yang tangguh dalam pengembangan agribisnis yang terintegrasi, penguatan program penyuluhan dan bimbingan bagi petani dan kelompok tani, pemberian hak akses terhadap sumberdaya pertanian (lahan, air, modal), serta pengakuan atas hak-hak teritorial masyarakat komunal petani.

- 4) Optimisasi penggunaan sumberdaya alam, khususnya lahan dan air. Pemanfaatan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat, sehingga akan tercipta pembangunan agribisnis yang berkelanjutan (*sustainable agribusiness development*).
- 5) Penguatan komoditas unggulan dan pengembangan komoditas alternatif. Komoditas-komoditas unggulan yang sudah ada perlu untuk diperbaiki kinerjanya, misalnya dengan penggantian tanaman karet dengan bibit baru yang berasal dari klon-klon unggul yang sesuai dengan situasi setempat. Disamping itu, pengembangan komoditas-komoditas alternatif (selain padi di subsektor tanaman pangan, atau karet di subsektor perkebunan) juga perlu terus dikembangkan, dengan tetap memperhatikan aspek permintaan, hingga dihasilkan produk-produk unggulan baru yang berdayasaing; sehingga akan meningkatkan variabilitas produk dan pengurangan risiko usaha. Pada akhirnya produk-produk baru tersebut akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi daerah.
- 6) Mendorong diversifikasi pertanian di lahan usahatani melalui pengembangan sistem pertanian campuran berlandaskan usahatani keluarga (*family-based integrated farming*) dengan menerapkan sistem tanaman sela (*intercropping*), pergiliran tanaman (*sequential cropping*) bagi tanaman musiman, dan disertai dengan tanaman perennial dan ternak kecil (*small ruminance*), unggas dan kolam ikan. Kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong hal ini -- sesuai dengan prinsip keunggulan dan sesuai dengan kondisi ekosistem setempat -- sangat diperlukan, sehingga dapat tercipta *family-based integrated farming* yang bersifat *efficient* (efisien), *equitable* (berkeadilan), dan *sustainable* (berkelanjutan).
- 7) Reorientasi kebijakan pemerintah daerah. Reorientasi kebijakan pemerintah daerah dari orientasi produksi kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku bisnis. Reorientasi kebijakan pemerintah daerah juga diperlukan agar, disatu pihak, dapat mendorong aktivitas swasta di bidang agribisnis dan, dilain pihak, mampu mendorong mereka untuk melaksanakan konservasi sumberdaya lahan dan air ke arah pertanian berkelanjutan. Perubahan kebijakan ini terutama diarahkan untuk dapat mengurangi biaya-biaya transaksi tinggi (*high cost economy*) dan dapat memberikan pelayanan kepada swasta (termasuk petani wirausaha) dalam mengembangkan agribisnis yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah perdesaan. Disamping itu, untuk mendorong konservasi lahan dan air, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegakkan hak-hak masyarakat daerah kepada sumberdayanya.

PENUTUP

- 1) Pembangunan agribisnis dan pembangunan ekonomi lokal merupakan dua hal yang sangat terkait. Pembangunan pertanian dengan menggunakan pendekatan sistem agribisnis secara konseptual dan faktual telah terbukti mampu meningkatkan pencapaian pembangunan ekonomi daerah dalam menciptakan nilai tambah dan pendapatan para pelaku usaha, dan

- mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat di pedesaan.
- 2) Kabupaten Kapuas pada saat ini (secara tradisional) telah memiliki beberapa komoditas unggulan yang memiliki daya saing yang cukup baik di tingkat provinsi, khususnya komoditas padi, karet, perikanan laut, dan beberapa komoditas peternakan. Akan tetapi, komoditas-komoditas unggulan tersebut masih belum dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem agribisnis, sehingga potensi ekonominya masih belum dikembangkan secara optimal.
 - 3) Pengembangan agribisnis berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Kapuas dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi agro-ekosistem setempat, prinsip-prinsip sosial (berkerakyatan, berkeadilan), prinsip-prinsip dan ekonomi (berorientasi pasar, berdayasaing, nilai tambah, penciptaan lapangan kerja), serta memiliki dukungan kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), dukungan kelembagaan, teknologi dan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2003. Formasi Makro-mikro Pengembangan Ekonomi Daerah. Bahan Kuliah Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kapuas dan Lembaga Penelitian Universitas Palangkaraya. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas 2005-2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2005. Pendapatan Regional Kalimantan Tengah, 2000- 2004.
- BPS Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2005. Kalimantan Tengah Dalam Angka – Tahun 2004. BPS Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kapuas. 2005. Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2004. BPS Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas.
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kapuas. 2005. Kabupaten Kapuas Dalam Angka – Tahun 2004. BPS Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas.
- Blakely, Edward and Ted K. Bradshaw. 2002. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (3rd Edition). SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- GTZ. 2003. The Local/Regional Economic Development Toolkit. <http://www.wiram.de/toolkit/>
- Syaukat, Yusman. 2002. Pengelolaan Lingkungan Transmigrasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional. Paper untuk Pelatihan Kader Kereserasian Lingkungan Kawasan Transmigrasi. Palembang, 29 Juli – 2 Agustus 2002.
- Syaukat, Yusman. 2005. Pembangunan Ekonomi Lokal. Bahan Kuliah, Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Winoto, Joyo. 1997. Pedoman Analisis Pewilayahan Komoditas Pertanian.
- World Bank. 2002. *Local Economic Development: LED Quick Reference*. Urban Development Unit of The World Bank, Washington, February 2002.